

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, S., & Si, M. (2014). Kebijakan Publik, Bandung: CV. *Pustaka Setia*.
- Harahap, N. (2020). Buku Metodologi Penelitian Kualitatif. *Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara*.
- Hamdi, M. (2014). Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi. Ghalia Indonesia.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, R. (2017). Kebijakan publik. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Nuraini, A., & Sawir, M. (2022). Bahan Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik. Media Sains Indonesia.
- Pasolong, H. (2017). Teori Administrasi Publik. Bandung: *Alfabeta*
- Smith, Thomas B. 1973. *The Policy Implementation Process*. Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing Company.
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Sugiyono, S. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta, 1-11.

Jurnal

- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-taqaddum*, 8(1), 21-46.
- Idza, A. A. (2023). Gelandangan Dan Pengemis Dalam Konteks Ketenteraman Dan Ketertiban Umum. *Jurnal Tatapamong*, 145-161.

- Laksa, K. S. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Uptd Liponsos Keputih. *Praja observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 2(01), 91-98.
- Lindawati, A., & Rahman, A. (2023). Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tangerang Selatan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(3), 219-231.
- Mutmainah, U. G. (2022). Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Sumber Intansi dan Undang-Undang

- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2012 BAB I pasal 1 ayat (9) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Gubernur (PERGUB) No.75 tahun 2017 tentang “Tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Dinas Sosial pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat”.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
- Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 504 & 505 tentang gelandangan dan pengemis
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang fakir miskin dan anak terlantar yang menjadi tanggung jawab negara.

Rujukan Elektronik

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

<https://jabarprov.go.id/layanan/pengaduan-ppks-pemerlu-pelayanan-kesejahteraan-sosial-1687858099>

UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Provinsi Jawa Barat

<https://www.instagram.com/griyabinakarya.dinsosjabar/>

Berita pengemis bermasalah

[Pengemis Kaya Asal Kota Kediri Terciduk Satpol PP, Bawa Uang Rp 40 Juta di Tas - Tribunjogja.com](#)